

BAB I

PEDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi pengelolaan keuangan daerah tidak terlepas dari tujuan diberlakukannya otonomi daerah itu sendiri, yaitu selain untuk peningkatan pelayanan *public*, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, juga dalam rangka pengalokasian sumber daya manusia yang efisien dan efektif, serta penciptaan ruang gerak bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Sekalipun demikian, berbagai perubahan tersebut harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah, yaitu akuntabilitas, kejujuran dalam mengelola keuangan *public*, transparan, dan pengendalian. Keuangan daerah dikelola dengan berdasarkan azas umum: tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.

Sebagaimana dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyampaikan laporan keuangan yang mencakup: (1) Laporan realisasi anggaran, (2) Neraca keuangan daerah, (3) Laporan arus kas, (4) Catatan atas laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan daerah adalah mengatur penyusunan laporan keuangan yang merupakan salah satu kewajiban dari pemerintah

kabupaten/kota dalam menyelenggarakan dan mengelola keuangan daerah dalam 1 (satu) periode anggaran (Hariadi, 2010).

Sebagai salah satu kota yang ada di Indonesia, kota Palembang juga memiliki permasalahan pada kinerja realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah. badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota Palembang bertugas meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dilihat dari perkembangan APBD Kota Palembang pada tabel 1.1 dibawah ini:

Tabel 1.1
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang Tahun 2016-2019

Tahun	Uraian	Anggaran	Realisasi
2016	Pendapatan asli daerah	840.572.306.099.31	781.413.947.765.14
	Pendapatan transfer	2.433.328.762.725.34	2.132.270.003.171.24
	Lain-lain pendapatan yang sah	192.233.045.058.63	209.219.176.258.63
	Total	2.896.134.113.873.28	3.122.904.127.135.01
2017	Pendapatan asli daerah	1.099.308.967.841.03	1.091.704.605.854,90
	Pendapatan transfer	2.454.180.417.266.77	2.307.939.678.493.49
	Lain-lain pendapatan yang sah	25.500.000.000.00	17.949.448.673.00
	Total	3.578.989.385.107.80	3.417.593.733.021.39
2018	Pendapatan asli daerah	1.100.505.155.700.04	953.257.612.127.74
	Pendapatan transfer	2.684.728.990.157.43	2.376.171.481.107.14
	Lain-lain pendapatan yang sah	166.800.790.197.99	156.409.070.615.00
	Total	3.952.034.936.055.46	3.485.838.163.849.88
2019	Pendapatan	3.436.828.903.746,55	3.496.147.585.514,73

	asli daerah		
	Pendapatan transfer	6.315.428.531.000,00	5.698.701.179.582,00
	Lain-lain pendapatan yang sah	31.210.170.000,00	21.054.801.615,00
	Total	10.533.925.626.158,80	9.663.613.070,581,47

Sumber : BKPAD kota Palembang (Data olah kembali), 2020

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan fenomena bahwa pendapatan daerah Kota Palembang selama 3 tahun dari tahun 2016 sampai 2018 mengalami ketidakstabilan pendapatan. Pendapatan yang terdiri dari pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah, mengalami kenaikan serta penurunan. Pendapatan dapat dilihat dari nilai anggaran yang didapat.

Tabel 1.2
Realisasi Anggaran Belanja Kota Palembang
Tahun 2016-2018

Tahun	Uraian	Anggaran	Realisasi
2016	Belanja Operasi	2.555.026.150.570	2.335.937.833.701
	Belanja Modal	812.338.278.189	577.697.336.830
	Belanja tidak terduga	1.000.000.000	992.817.099
	Total	3.369.864.428.760	2.915.966.125.847
2017	Belanja Operasi	2.489.421.736.518	2.283.607.852.669
	Belanja Modal	889.936.798.165	857.095.134.848
	Belanja tidak terduga	2.650.000.000	64.000.000
	Total	3.383.208.534.684	3.141.848.658.597
2018	Belanja Operasi	2.940.538.836.024,26	2.635.562.081.018,48
	Belanja Modal	1.048.832.631.198,56	851.367.126.023,84

	Belanja tidak terduga	3.000.000.000,00	80.609.703,00
	Total	3.992.371.467.222.82	3.487.009.816.745.32
2019	Belanja Operasi	6.140.097.371.311,47	5.494.913.456.747,11
	Belanja Modal	1.820.168.210.865,27	1.652.799.376.582,26
	Belanja tidak terduga	6.000.000.000,00	4.071.125.143,00
	Total	683.982.783.412,29	381.234.265.869,74

Sumber : BKPAD kota Palembang (Data olah kembali), 2020

Berdasarkan tabel 1.2 menunjukkan fenomena bahwa belanja daerah Kota Palembang selama 4 tahun 2016 sampai 2019 juga mengalami ketidakstabilan belanja daerah. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terealisasinya belanja daerah. hal ini menunjukkan anggaran daerah Kota Palembang tahun 2016 sampai 2019 sudah baik atau efisien, akan tetapi tidak terealisasinya anggaran belanja 100% menyebabkan anggaran pendapatan dan belanja tidak terduga perlu dilihat dari keserasian belanja, sehingga dapat dilihat bagaimana kinerja realisasi belanja pemerintah dalam pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah Kota Palembang terhadap masyarakatnya.

Pada tahun 2016 terdapat 15 OPD yang realisasi anggarannya rendah atau dibawah 60% dan beberapa OPD dilingkungan kota palembang masuk dalam kategori kinerja buruk hal ini terlihat di catatan yang dimiliki kantor wilayah Ditjen Pembendaharaan Provinsi Sumatera Selatan atau berdasarkan online monitoring span dari Direktorat Jendral Perbendaharaan Kanwil Sumbangsel.

Inilah OPD yang serapan dibawah 60% :

1. Disperinda 20%
2. Dinas Peternakan 23,3%
3. Dinas Pertanian TPH 27%
4. Dinas Pendidikan 31,9%
5. Kesbangpol 33,3%
6. Dinas Kehutanan 39,5%
7. Sekertariat Daerah 45%
8. Dinas Kesehatan 45,5%
9. Dinas Sosial 48,5%
10. Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 48,6%
11. Dinas Perkebunan 53,4%
12. BLH 54,3%
13. Disbudpar 57,2%
14. Badan P3A 59,4%

(Madon, haluansumatra.com 24 November 2016).

Faktor pertama yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan daerah yaitu penerapan sistem pengendalian intern pemerintah yang memadai, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyatakan bahwa “Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yaitu sistem pengendalian inten yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan

pemerintah daerah”. Pengawasan intern meliputi keseluruhan dari proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan aktivitas pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilakukan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditentukan secara efektif dan efisien untuk kepemimpinan pimpinan dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik. Menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melaksanakan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah agar pengelolaan keuangan negara menjadi efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI terhadap LKPD Tahun 2018 terdapat 1.279 kelemahan struktur pengendalian intern, 2.753 kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan 1.826 kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan (www.bpk.go.id) . Lemahnya SPI yang dimiliki pemerintah dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan laporan keuangan daerahnya hingga laporan keuangan yang dihasilkan tidak andal.

Faktor kedua yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan daerah adalah sistem akuntansi keuangan daerah. Simatupang (2017) menemukan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Sistem akuntansi keuangan daerah adalah suatu prosedur dari tahap awal pengumpulan data sampai pelaporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Pmendagri No.59 Tahun 2007).

Faktor ketiga yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan daerah adalah pengawasan fungsional. Iskandar (2015) menemukan bahwa pengawasan fungsional berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional, baik yang berasal dari lingkungan internal pemerintah maupun yang berasal dari lingkungan eksternal pemerintah (Sumarsono, 2010). Pada pemerintah daerah terdapat aparat pengawasan fungsional intern pemerintah kabupaten dan kota yang membantu pimpinan pemerintah dalam melakukan pengawasan apakah kegiatan yang dilakukan oleh aparat sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan program yang telah ditentukan (Laksana, 2014).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Simatupang (2017) berjudul Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah, sistem akuntansi keuangan daerah, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah (Studi Pada SKPD kota Padang Sidempuan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penambahan variabel independen, waktu penelitian dan lokasi penelitian.

Berdasarkan fenomena-fenomena terkait kelemahan-kelemahan, menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan laporan keuangan daerah yang

terjadi di Pemerintah Kota Palembang belum maksimal maka peneliti tertarik untuk meneliti **“Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Pengawasan Fungsional terhadap efektivitas pengelolaan keuangan Daerah Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Palembang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah?
2. Bagaimana pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah?
3. Bagaimana pengaruh pengawasan fungsional terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Untuk memfokuskan hasil penelitian ini, maka penelitian ini akan berada dalam batas pembahasan mengenai pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah, sistem akuntansi keuangan daerah, dan pengawasan fungsional terhadap efektivitas pengelolaan laporan keuangan daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kota Palembang.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah, sistem akuntansi keuangan daerah, dan pengawasan fungsional terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada OPD kota Palembang.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai akuntansi sektor publik.
- b. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan agar terdapat kesesuaian antara teori dan praktik.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan pengalaman berharga yang dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih luas dalam pendekatan terhadap suatu masalah yang diteliti, terutama mengenai penelitian yang membahas kajian akuntansi sektor publik. Selain itu dapat menjadi sarana ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama duduk di bangku kuliah dan membandingkannya dengan keadaan yang terjadi di lapangan.

b. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghimpun informasi sebagai sumbangan pemikiran untuk dijadikan bahan masukan dan sebagai pertimbangan bagi Pemerintah Daerah, khususnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Palembang guna meningkatkan kinerjanya menjadi lebih baik.

c. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan ilmu pengetahuan dalam rangka pengembangan disiplin ilmu akuntansi, serta dapat dijadikan sebagai sumber referensi dalam melakukan penelitian bagi para mahasiswa, khususnya mahasiswa Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Darma.